



APBD Anjlok, **Pemkab Sesak Napas**

Anggaran Daerah Turun Drastis, Tersisa 2,4 Triliun 2027

Efisiensi Jadi Kunci, Tapi Belanja Pegawai Tetap Tinggi

Anggaran Dipangkas Bikin Sesak Napas

PEMERINTAH Kabupaten Berau menuntut untuk semakin teliti, taktis, dan selektif dalam program kerja untuk 2027. Hal ini lantaran postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan diproyeksikan bakal merosot tajam hingga hanya menyisakan kisaran Rp2,1-2,4 triliun.

Grafik keuangan di Bumi Batiakkal tercatat terus-menerus mengalami tren penyusutan dalam dua tahun belakangan. Sebagai perbandingan, pada 2025, total APBD Berau masih berada di angka Rp5,25 triliun lebih.

Namun, kemudian terpengkas menjadi Rp3,4 triliun pada 2026, hingga akhirnya diprediksi kembali merosot pada 2027.

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyatakan, tren efisiensi anggaran secara nasional sebagai imbas dari pengetatan kebijakan pemerintah pusat dipastikan masih belum akan berakhir.

Menyikapi postur fiskal daerah yang tengah menghadapi masa paceklik tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipaksa memutar otak untuk memanfaatkan sisa ruang fiskal yang tersedia.

Said mengungkapkan, salah satu sektor belanja yang berpotensi besar terkena imbas pemangkasan demi efisiensi adalah sektor belanja pegawai. Terbuka opsi pemotongan tunjangan yang selama ini diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Berau.

Selain itu, penurunan drastis ini dipastikan akan memukul besaran kuota dana desa atau alokasi dana transfer yang dikucurkan pemerintah daerah ke setiap kampung, serta berisiko menghambat laju proyek pembangunan fisik.

Sebagai langkah penyelamatan, Said yang juga Ket-



ua TAPD menegaskan akan segera menggelar pertemuan tertutup dengan kepala daerah serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perombakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan kapasitas anggaran yang ada.

Namun, ia menjamin pelayanan dasar publik, seperti sektor kesehatan dan pendidikan, akan tetap dikunci sebagai prioritas yang tidak boleh diganggu gugat.

Di sisi lain, Bupati Berau, Sri Juniarsih, memastikan, di tengah hantaman badai fiskal tersebut, pihaknya akan tetap menempatkan belanja pegawai dan pemenuhan janji politik kepada masyarakat sebagai prioritas utama yang dijalankan secara bertahap.

Guna menyiasati keterbatasan dana, Pemkab Berau memilih opsi melakukan rasionalisasi nilai bantuan sosial, alih-alih menghentikan program unggulan.

Sri Juniarsih mencontohkan, salah satu langkah efisiensi yang diambil adalah menurunkan besaran nilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya Rp500 ribu per kepala, kini disesuaikan menjadi Rp300 ribu agar jangkauan manfaatnya tetap bisa dirasakan secara luas.

Sementara untuk proyek infrastruktur berskala besar yang masuk dalam janji kerja, seperti pembangunan fasilitas sirkuit balap, dipastikan akan tetap

dilanjutkan secara bertahap disesuaikan keuangan daerah.

Merespons kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, mengakui, daerah berada dalam posisi dilematis dan tidak memiliki banyak pilihan selain berkompromi dengan kebijakan pengetatan pusat.

Rudi mengingatkan, penurunan APBD hingga lebih dari setengahnya ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat karena berkurangnya proyek yang selama ini memicu perputaran ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta material bangunan.

Rudi menyarankan agar pemerintah daerah segera menyortir ulang program kerja dan berani mengambil keputusan tegas menunda seluruh rencana pembangunan yang bersifat monumental dan tidak memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik.

DPRD mendesak agar sisa anggaran dipusatkan pada sektor-sektor penopang hajat hidup warga, seperti optimalisasi jalan usaha tani, pembukaan akses jalan menuju destinasi wisata, serta pemenuhan hak belanja pegawai agar roda perekonomian tidak stagnan.

PELAYANAN PUBLIK KIAN TERBATAS

Kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat memaksa Pemkab Berau memutar otak lebih keras. Dengan ruang fiskal yang kian menyusut, pemerintah daerah dihadapkan pada dilema pelik:

bagaimana menjaga hak-hak dasar publik tetap terpenuhi di tengah ketiadaan dana yang melimpah?

Kondisi pengetatan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah realitas baru yang mengubah lanskap eksekusi program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Alih-alih melumputkan roda pemerintahan, badai efisiensi ini harus memicu lahirnya gaya kepemimpinan baru yang adaptif, taktis, dan sarat akan strategi kolaborasi.

Sektor pelayanan dasar, khususnya jaminan kesehatan, menjadi benteng pertama yang diuji oleh realitas ekonomi ini. Penurunan daya beli masyarakat berdampak langsung pada tingkat kesehatan.

Fenomena kepesertaan jaminan kesehatan yang tidak aktif atau bahkan warga yang belum terdaftar sama sekali mulai bermunculan akibat tekanan finansial.

"Jangan sampai masyarakat terbebani dengan hambatan finansial yang berat," tegas Asisten I Setda Berau, Hendratno, dalam pertemuan bersama BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, Kamis (11/6/2026).

Saat ini, dari total 308.020 jiwa penduduk Kabupaten Berau, sebanyak 263.213 jiwa tercatat sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini menempatkan Berau di posisi ke-8 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Meski dihantam pemotongan anggaran, komitmen politik untuk menjaga cakupan kepesertaan tetap berada di angka 100 persen tidak boleh goyah. Sebab, urusan kesehatan adalah hak publik yang tidak boleh ditawar dengan alasan efisiensi.

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 3

Komitmen tersebut diper-
tegas Wakil Bupati Berau,
Gamalis, yang mengakui ge-
lombang efisiensi ini berada di
luar kendali perencanaan awal
pemerintah daerah. Namun,
mandat porsi anggaran kese-
hatan sebesar 20 persen tetap
diplot secara utuh.

Pembenahan infrastruktur
vital seperti rumah sakit dae-
rah tetap berjalan melalui ske-
ma pengaturan skala prioritas
yang ketat agar hak dasar war-
ga tidak terlantar.

Nasib serupa menimpa sek-
tor pendidikan. Ruang fiskal yang
sempit tidak membuat Bupati Be-
rau, Sri Juniarsih, menghentikan
investasi sumber daya manusia
jangka panjang. Program Bea-
siswa Berau Cerdas tetap diper-
tahankan sebagai program ung-
gulan yang menyentuh langsung
masyarakat tingkat bawah.

Pada tahun ini, pemerintah
menyediakan kuota untuk 1.050
penerima, yang terbagi atas
550 pelajar tingkat menengah
(SMA/SMK/MA) dengan besa-
ran dana Rp3 juta per siswa,
serta 500 mahasiswa (jenjang
D2 hingga S1) dengan nominal
Rp4 juta per orang.

Langkah ini menjadi bukti
efisiensi bukan berarti me-
nutup program, melainkan
memilah dengan cermat mana
agenda kerja yang memiliki
dampak langsung terhadap
jaring pengaman sosial.

Sementara itu, untuk sek-
tor agraria yang menjadi ban-
talan ekonomi daerah, Pem-
kab Berau menerapkan strategi
'jemput bola' ke Jakarta. Men-
yadari kas daerah tidak mam-
pu lagi membiayai pengadaan
Alat dan Mesin Pertanian
(Alsintan) dalam jumlah besar,
bupati melakukan lobi intensif
ke kementerian terkait.

Hasilnya, keterbatasan
APBD bisa ditutupi oleh kucu-
ran dana Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara
(APBN). Pada tahun ini, Be-
rau mengamankan bantuan
komoditas berupa bibit kakao

dan kelapa dalam untuk lah-
an seluas masing-masing 200
hektare, lengkap dengan ke-
pastian tambahan kuota ban-
tuan alsintan bagi kelompok
tani dan nelayan lokal.

MENUNTUT KOMITMEN SWASTA

Ketika belanja mod-
al daerah tidak lagi mampu
menopang proyek-proyek
strategis non-pelayanan dasar,
mata pemerintah daerah tertu-
ju pada sektor swasta. Sinergi
antara pemerintah dan kor-
porasi melalui dana Corporate
Social Responsibility (CSR)
dirombak total agar tidak lagi
berjalan tanpa arah yang jelas.

Dalam Forum Sinkronisasi
TJSL yang digelar di Bapeli-
bang Berau, Pemkab meng-
umpulkan 47 kepala OPD dan
perwakilan manajemen peru-
sahaan swasta yang beroper-
asi di Berau.

Pemerintah menerapkan
kebijakan baru berupa audit
kapasitas finansial mitra swas-
ta secara transparan. Pemer-
intah tidak ingin lagi melihat
program kemitraan yang ber-
sifat seremonial atau sekadar
menggugurkan kewajiban un-
dang-undang.

"Jadi jangan kasih sedikit
lalu pergi, kita mau ini berke-
lanjutan. Kalau cuma dikasih
satu kali aja, itu namanya nyo-
gok," ujar Hendratno.

Pemerintah daerah kini
mewajibkan setiap korporasi
untuk menyusun dokumen pel-
aporan berkala yang terukur
dan terintegrasi langsung den-
gan cetak biru Rencana Pem-
angunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).

Swasta diposisikan se-
bagai mitra strategis, terutama
dalam mendanai infrastruktur
penunjang sektor pariwisata
yang merupakan motor peng-
gerak ekonomi masa depan
Berau pasca pertambangan.

UJIAN KREATIVITAS TUAN RUMAH

Agenda regional yang su-
dah terjadwal pun tidak luput



dari dampak pengetatan ini.
Kabupaten Berau ditunjuk
menjadi tuan rumah Hari Kelu-
arga Nasional (Harganas) ke-
33 tingkat Provinsi Kalimantan
Timur yang akan dilaksanakan
pada akhir Juni ini.

Di tengah keterbatasan
dana belanja daerah, bupati
menginstruksikan seluruh jaja-
ran kepanitiaan untuk mengede-
pankan kreativitas dan gotong
royong lintas sektor.

Delapan program inti, mu-
lai dari pelayanan kontrasepsi,
pasar sembako murah, hingga
pemeriksaan kesehatan men-
tal, tetap wajib digelar secara
prima demi menjaga reputasi
daerah di tingkat provinsi.

Siasat unik diterapkan, di
mana setiap OPD diwajibkan
menyumbang logistik berupa
makanan bergizi gratis yang
disajikan menggunakan wa-
dah tradisional non plastik
demi menekan biaya opera-
sional sekaligus menjaga ke-
bersihan lingkungan.

Korporasi swasta dan
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang beroperasi di
Berau juga ditarik untuk ikut
membantu kebutuhan teknis di
lapangan.

PROMOSI WISATA MU- LUT KE MULUT

Dampak paling kentara dari
efisiensi anggaran ini barangka-
li terlihat pada sektor promosi
pariwisata. Anggaran untuk be-
lanja iklan konvensional berska-
la besar, seperti pemasangan
billboard, pengelolaan videotron
komersial, maupun iklan media

massa nasional terpaksa di-
pangkas demi menyelamatkan
pos anggaran lainnya. Namun,
tingginya kebutuhan kunjungan
wisatawan menuntut adanya
terobosan tak biasa.

Pemkab Berau kini mener-
apkan strategi promosi interper-
sonal atau metode "gerilya dari
mulut ke mulut". Saat melepas
kontingen Penas Petani Ne-
layan XVII menuju Gorontalo,
Bupati Sri Juniarsih, menitipkan
misi diplomatik kebudayaan
kepada setiap delegasi daerah
yang berangkat menggunakan
sisa anggaran daerah tersebut.

Setiap aparat sipil maupun
warga yang melakukan perja-
lanan dinas atau mengikuti kegi-
atan di luar daerah diwajibkan ber-
tindak sebagai duta wisata aktif.
Mereka diminta memanfaatkan
setiap ruang dialog untuk men-
ceritakan keindahan destinasi
wisata Berau secara persuasif
kepada masyarakat luar.

Strategi serupa juga diter-
apkan di dalam daerah. Ketika
Berau menerima kunjungan
kerja atau menjadi tuan rumah
festival tingkat provinsi, pe-
merintah daerah secara masif
merangkul para tamu selama
waktu senggang mereka.

Sela-sela waktu kosong
selama dua hari di luar jadw-
al formal dimanfaatkan secara
terstruktur oleh dinas terkait un-
tuk mengarahkan rombongan
tamu agar berbelanja produk
lokal dan mengunjungi destina-
si wisata terdekat. **(DINI DIVA
APRILIA/HENDRA IRAWAN/
SULAIMAN)**



Polemik Penetapan Tarif BPHTB MENCARI KEPASTIAN PAJAK DI ATAS TANAH BERAU

POLEMIK mengenai kepastian hukum dalam penetapan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Berau kini bergulir menjadi pembahasan krusial.

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perole-

han hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak ini merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang kini diperbarui melalui UU HKPD), BPHTB telah dialihkan menjadi Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, bukan lagi Pemerintah Pusat.

BPHTB tidak hanya dikenakan saat terjadi transaksi jual beli, melainkan pada beberapa peristiwa hukum.

Pertama, Peminjaman Hak, yakni jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, atau penunjukan pembeli dalam lelang.

Kedua, Pemberian Hak Baru, yakni kelanjutan pelepasan hak atau pemberian hak di luar pelepasan hak oleh pemerintah.

Ketiga, Program Pemerintah, termasuk pendaftaran

tanah pertama kali seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tetap memiliki ketentuan BPHTB terutang.

Secara umum, formula dasar untuk menghitung nilai nominal BPHTB adalah:

$$\text{BPHTB Terutang} = 5\% \times (\text{Dasar Pengenaan Pajak-NPOPTKP})$$

Tarif Pajak paling tinggi ditetapkan sebesar 5 persen, disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota.

Lalu, Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) menjadi dasar pengenaan pajak. Nilai ini ditentukan berdasarkan harga transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) jika harga transaksi tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) merupakan pengurangan sebelum dikalikan tarif. Jumlah NPOPTKP berbeda-beda di setiap daerah berdasarkan perda. Namun, UU mengatur batas minimumnya. Misalnya, untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat biasanya diberikan batasan NPOPTKP yang jauh lebih

tinggi.

Komisi II DPRD Berau mendorong adanya kesamaan persepsi serta transparansi regulasi agar tidak memicu perdebatan panjang yang merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menilai, perselisihan yang berkembang di tengah publik murni berakar dari perbedaan pemahaman antara warga dan pemerintah mengenai dasar penentuan nilai objek pajak.

Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan organisasi masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, hingga Bagian Hukum Setda Berau, Senin (8/6/2026).

Dalam RDP itu, DPRD Berau menemukan bukti tidak adanya kesamaan nilai pada beberapa sampel objek tanah yang dibahas. Padahal, tanah-tanah yang dibandingkan tersebut berada di hamparan yang sama dan mengusung karakteristik serupa.

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 5



AGUS URIANSYAH

Anggota Komisi II DPRD Berau

Dari tiga sampel yang diambil, tidak ada kesamaan angka. Sehingga muncul pertanyaan, pemerintah menetapkan angka itu berdasarkan apa, karena ada perbedaan yang cukup jauh pada objek yang hampir sama"



“Dari tiga sampel yang diambil, tidak ada kesamaan angka. Sehingga muncul pertanyaan, pemerintah menetapkan angka itu berdasarkan apa, karena ada perbedaan yang cukup jauh pada objek yang hampir sama,” ungkap Agus.

Kondisi tersebut memperkuat dugaan kuat pemerintah belum mengantongi standar baku dalam menetapkan nilai BPHTB.

Agus menegaskan, protes masyarakat selama ini bukan untuk menolak kewajiban membayar pajak daerah, melainkan menuntut adanya transparansi, kepastian hukum, serta kepastian harga agar hak-hak mereka tidak dikebiri.

Atas temuan tersebut, RDP menelurkan tiga poin kesepakatan. Salah satunya memberikan tenggat waktu hingga 15 Juni 2026 bagi instansi terkait untuk segera menyetorkan hasil kajian teknis sekaligus formula penyelesaian atas keluhan wajib pajak.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, juga mengkritik pola penetapan BPHTB selama ini yang terkesan masih didasarkan pada asumsi sepihak petugas di lapangan. Pola tebak-te-

bakan itu terbukti memicu ketidakadilan pelayanan karena melahirkan perbedaan nominal pajak untuk objek tanah yang berada dalam satu zonasi yang sama.

“Sebenarnya ada regulasinya, tapi untuk dasar penetapan angka itu tidak ada secara spesifik payung hukumnya. Akibatnya, dalam satu lokasi dan satu zonasi saja, bisa muncul nilai yang berbeda-beda. Ini yang menimbulkan kebingungan di masyarakat,” kata Rudi.

Rudi membeberkan, laporan keluhan yang masuk ke meja legislatif sudah sangat menumpuk. Bahkan, dalam beberapa kasus, nilai BPHTB yang wajib disetor nominalnya justru jauh lebih meroket dibanding nilai objek tanah itu sendiri.

Imbas dari mahalnya beban pajak yang dinilai tidak masuk akal tersebut, banyak transaksi agraria milik masyarakat lokal yang akhirnya mandek dan tertunda bertahun-tahun.

Sebagai langkah konkret, DPRD mendesak Pemkab Berau untuk segera mengusulkan regulasi baru berupa Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang zonasi nilai

tanah sebagai acuan resmi.

Melalui regulasi ini, setiap kawasan akan memiliki standar nilai pasar tanah yang baku, merata, serta dapat dievaluasi secara berkala setiap tahun melalui instrumen Perbup tersebut.

Di samping itu, untuk memotong rantai birokrasi, mengemuka pula usulan agar perhitungan tarif BPHTB untuk kategori khusus seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengurusan hak waris, serta dokumen wasiat dialihkan secara seragam dengan berbasis pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyatakan, pemerintah daerah selalu terbuka terhadap setiap masukan yang disuarakan warga. Namun, ia menekankan, setiap usulan formula baru tetap harus disaring dan dikaji mendalam dari sudut pandang yuridis agar eksekusinya tidak menabrak undang-undang perpajakan nasional.

Mengenai jawaban operasional atas tuntutan peralihan tarif ke basis NJOP maupun klaster zonasi, Sri Juniarsih memilih menyerahkan detail formula tersebut kepada or-



RUDI MANGUNSONG
Ketua Komisi II DPRD Berau

Sebenarnya ada regulasinya, tapi untuk dasar penetapan angka itu tidak ada secara spesifik payung hukumnya. Akibatnya, dalam satu lokasi dan satu zonasi saja, bisa muncul nilai yang berbeda-beda. Ini yang menimbulkan kebingungan di masyarakat”

ganisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang memiliki kewenangan penuh di sektor pendapatan daerah.

“Terkait BPHTB itu nanti secara teknis akan dijawab oleh OPD-nya,” kata Sri Juniarsih. **(DINI DIVA APRILIA/ HENDRA IRAWAN)**



Harga Pertamina Meroket Siap-siap Antre Pertalite

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Berau, terhitung mulai Rabu (10/6/2026). Dalam kebijakan terbaru ini, kenaikan harga yang signifikan terjadi pada BBM jenis Pertamina.

Pertamax yang sebelumnya dijual Rp12.600 per liter, kini melonjak naik menjadi Rp16.650 per liter. Sementara, harga BBM bersubsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami perubahan.

Pertamax Turbo tetap bertahan di angka Rp21.200 per liter, Pertamina Dex seharga Rp25.350 per liter, dan Dexlite dijual tetap Rp23.500 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, Pertalite masih di harga Rp10.000 per liter dan BioSolar tetap Rp6.800 per liter.

Kebijakan penyesuaian harga Pertamina ini pun sukses menghebohkan masyarakat Berau. Kenaikan tersebut memicu reaksi keras lantaran terlalu mendadak dan terlampaui tinggi.

Sejumlah pengendara yang rutin mengonsumsi Pertamina mengaku sangat terkejut dengan perubahan tarif yang terkesan tiba-tiba ini.

Salah seorang pengguna

motor, Melati Sukma, mengungkapkan keberatannya atas lonjakan harga yang dinilai sangat melambung tersebut.

Namun, karena angka di papan pengisian SPBU sudah telanjur berubah, ia mengaku terpaksa tetap membeli Pertamina meskipun harus merogoh kocek lebih dalam.

"Saya kaget dan keberatan, namun bagaimana pun harga sudah berubah di pasaran," ujar Melati.

Melati menegaskan dirinya memilih untuk tidak beralih ke jenis BBM lain yang memiliki oktan lebih rendah.

Keputusan bertahan tersebut diambil lantaran ia ingin menjaga performa kendaraan agar tetap awet dan sesuai dengan spesifikasi pabrikan mesin motornya.

Bagi Melati, kenaikan ini tidak sampai memotong produktivitasnya karena sepeda motor tersebut merupakan transportasi harian untuk bekerja maupun menikmati waktu luang saat hari libur.

Meski begitu, ia menaruh harapan agar kementerian terkait di tingkat pusat bersedia meninjau serta mengkaji ulang kebijakan harga baru ini.

Menurutnya, konsumen Pertamina di daerah saat ini tidak melulu datang dari kalan-

gan ekonomi atas.

Namun, juga banyak masyarakat kelas menengah yang kini ikut terimpit di tengah naiknya harga berbagai barang pokok.

"Harapannya ada pertimbangan dari kementerian terkait atas kenaikan harga Pertamina untuk dikaji ulang," imbuhnya.

Reaksi serupa dilontarkan Widi, warga Berau lainnya yang mengaku syok saat melihat nominal baru di pylon sign SPBU.

Lonjakan harga yang mencapai selisih Rp4.050 per liter ini seketika membuatnya langsung berpikir ulang untuk mencari alternatif bahan bakar lain demi menyelamatkan kondisi keuangannya.

"Pas baca berita nasional saya kaget harga Pertamina naik," tutur Widi.

Akibat gap harga yang terlampau jauh antara nonsubsidi dan subsidi, Widi menyatakan terpaksa akan beralih menggunakan Pertalite untuk sementara waktu.

Sebab, jika ia memaksakan tetap mengisi Pertamina, maka pembelian dua liter saja anggarannya sudah menyentuh Rp33.300.

Kondisi tersebut dinilai sangat timpang jika dibandingkan dengan Pertalite bersubsidi yang saat ini harganya masih



bertahan Rp10.000 per liter.

Perbandingan biaya yang mencolok tersebut akhirnya mengalahkan faktor kenyamanan, sehingga sebagian warga kini rela mengorbankan waktu berdesakan di jalur antrean kendaraan yang mengular demi mendapatkan Pertalite.

"Terpaksa saya harus mengantre ke Pertalite dulu, soalnya harganya jauh sih," keluh Widi. (ADRIKNI SHOLIKHATI)

Limbah Udang Jadi Oleh-oleh Unggulan Pesisir Berau

KEPALA udang yang selama ini hanya dianggap limbah dan berakhir di tempat pembuangan, kini disulap menjadi produk camilan bernilai ekonomi oleh kelompok perempuan pesisir di Kampung Pegat Batumbuk, Kecamatan Pulau Derawan.

Melalui Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Kerjasama Jaya, para perempuan pesisir berhasil mengembangkan Uludang Crispy, makanan ringan berbahan dasar kepala udang yang tidak hanya unik, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Ketua Poklahsar Kerjasama Jaya, Riska Febriani, mengatakan, ide pengembangan Uludang Crispy muncul setelah kelompok mendapatkan pendampingan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Dinas Perikanan Kabupaten Berau melalui program Solutions for Marine and Coastal Resilience in the Coral Triangle (SOMACORE).

"Selama ini kepala udang tidak dimanfaatkan. Padahal masih punya potensi untuk diolah menjadi produk makanan yang bernilai ekonomi. Melalui



pendampingan yang kami terima, kami mencoba mengolahnya menjadi produk," ujarnya.

Tidak hanya berinovasi pada produk, kelompok ini juga terus memperkuat kualitas usaha.

Berbagai produk olahan yang mereka hasilkan, termasuk Uludang Crispy, yang kini telah mengantongi legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai bentuk jaminan mutu bagi konsumen.

"Alhamdulillah produknya tidak hanya Dijual di Kampung Pegat Batumbuk, tapi juga sudah masuk ke toko oleh-oleh di Tanjung Redeb," tuturnya.

Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menilai inovasi tersebut menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu menciptakan nilai tambah dari komoditas perikanan.

"Nilai tambah menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha perikanan. Inovasi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu melihat peluang dari bahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal," katanya.

Menurutnya, pengembangan produk olahan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan perempuan pesisir sendiri terus diperkuat melalui berbagai pelatihan dan pendampingan yang mencakup pengembangan usaha, pengemasan produk, pemasaran hingga pencatatan keuangan.

Program tersebut bertujuan membangun usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.

Manajer Senior Ekonomi Biru YKAN, Kiki Anggraini, menjelaskan, perempuan memiliki peran penting dalam rantai nilai perikanan, sehingga

ga perlu didorong untuk terus berinovasi.

"Perempuan memiliki peran besar dalam rantai nilai perikanan. Kami ingin memperkuat kapasitas mereka agar mampu mengembangkan usaha dan inovasi berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan," jelasnya.

Inovasi Uludang Crispy juga sejalan dengan konsep Shrimp Carbon Aquaculture (SECURE) yang dikembangkan YKAN.

Pendekatan ini mengintegrasikan budidaya udang berkelanjutan dengan perlindungan ekosistem mangrove, sehingga manfaat ekonomi dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan pesisir.

Dengan dukungan legalitas usaha, sertifikasi halal, serta pasar yang terus berkembang, Uludang Crispy diharapkan menjadi salah satu produk unggulan pesisir Berau yang mampu menembus pasar yang lebih luas sekaligus membuktikan limbah perikanan dapat diubah menjadi peluang ekonomi baru. (DINI DIVA APRILIA)



Ngebut Persiapan Tanpa Sirkuit Permanen

KATAN Motor Indonesia (IMI) Berau terus mematangkan persiapan atlet menjelang sejumlah kejuaraan, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser pada November mendatang.

Ketua IMI Berau, Noviar Ridwan, mengatakan, para atlet saat ini menjalani program latihan intensif untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding.

Selain latihan rutin, atlet juga diikutsertakan dalam berbagai kejuaraan di luar daerah sebagai uji kemampuan dan evaluasi perkembangan.

"Melalui event-event itu, kami bisa melihat sejauh mana kemampuan atlet berkembang dan apa yang masih perlu ditingkatkan," ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Noviar, pengalaman bertanding sangat penting untuk membentuk mental juara, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri atlet saat menghadapi kompetisi yang lebih besar.

Meski demikian, IMI Berau masih menghadapi tantangan, di mana yang mendasar adalah belum tersedianya sirkuit permanen sebagai pusat latihan dan pembinaan atlet otomotif.

Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala dalam memaksimalkan program pembinaan atlet balap motor.

"Ini tentu jadi kendala juga, tapi kami tetap optimis untuk terus berlatih dan berprestasi," katanya.

Kendati terbatas dari sisi fasilitas, Noviar juga tetap optimis atlet IMI Berau mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik di Porprov Kaltim 2026.

Ia berharap, dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga otomotif, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

"Dengan fasilitas yang lebih memadai, pembinaan atlet dapat dilakukan lebih optimal, sehingga peluang meraih prestasi juga semakin besar," tegasnya.

JANJI PEMERINTAH DAERAH

Pada awal tahun ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Berau menyebutkan, realisasi pembangunan sirkuit balap permanen menjadi salah satu proyek strategis daerah. Pembangunan sirkuit tersebut menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Berau.

Sirkuit balap yang diren-

canakan ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah penyaluran hobi, tetapi juga diproyeksikan sebagai pusat pembinaan atlet balap berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Berau di tingkat regional hingga nasional.

Kepala Dispora Berau, Amiruddin, mengungkapkan, sejumlah langkah awal telah dilakukan guna merealisasikan rencana tersebut. Mulai dari peninjauan lokasi hingga studi banding ke beberapa daerah yang telah memiliki sirkuit balap, salah satu rujukan utama adalah Sirkuit Surabaya.

Sirkuit Surabaya dinilai cukup representatif untuk dijadikan referensi desain. Namun, konsep yang akan diterapkan di Berau nantinya akan disesuaikan agar memiliki kualitas dan fungsi yang lebih optimal.

"Lintasan lurus di Sirkuit Surabaya sekitar 400 meter. Untuk di Berau, rencananya akan diperpanjang hingga 800 meter agar bisa menampung berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil," jelasnya.

Dari sisi ketersediaan lahan, Berau justru memiliki keunggulan karena telah menyiapkan lahan hibah seluas kurang lebih 12 hektare. Kawasan ini juga berpotensi



NOVIAR RIDWAN
Ketua IMI Berau

Dengan fasilitas yang lebih memadai, pembinaan atlet dapat dilakukan lebih optimal, sehingga peluang meraih prestasi juga semakin besar"

dikembangkan sebagai kawasan terpadu fasilitas olahraga lainnya.

Terkait kebutuhan anggaran, Amiruddin menyebutkan baru dapat ditentukan setelah rampungnya penyusunan Detailed Engineering Design (DED) yang akan dibahas bersama ketua cabang olahraga terkait dan KONI.

"Setelah desain final disepakati, barulah kebutuhan anggaran dan tahapan pembangunan fisik dapat dihitung secara rinci," pungkasnya. (*)



Maratua Musik Festival 2026

Padukan Konser, Budaya Adat, dan Aksi Lingkungan

MARATUA Musik Festival 2026 dijadwalkan akan berlangsung dari 30 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan penyajian yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Yudha Budisantosa, menjelaskan, kali ini, festival musik modern sengaja dikawinkan dengan kegiatan budaya lokal bertajuk Dakayu Malatua.

Penggabungan ini dilakukan agar kedua agenda besar tersebut dapat tampil di satu panggung dan waktu yang sama, sekaligus menyiasati jadwal Dakayu Malatua yang sempat tertunda pada Mei lalu akibat kendala teknis.

Selain integrasi budaya, festival tahun ini dirancang lebih panjang karena dimulai sejak siang hari, bergeser dari tahun sebelumnya yang digelar malam hari.

M2F juga melibatkan partisipasi UMKM dari 13 kecamatan serta komunitas pelaku kerajinan dan pelaku bisnis resor di Pulau Maratua.

"Acara seni budaya itu kan kita juga ingin melestarikan, termasuk memberi panggung kepada mereka yang ada di sana

untuk menampilkan kemampuannya," kata Yudha saat konferensi M2F, Jumat (12/6/2026).

CEO Mata Sanggam, Morten, menjamin, selama lima hari penuh, kawasan pulau terluar tersebut tidak akan sepi dari aktivitas hiburan karena jadwal acara telah terisi padat dari siang, sore, hingga malam hari.

Pada hari pertama, festival akan dibuka sejak siang dengan ritual tolak bala khas Suku Bajau yang dikoordinasikan bersama ketua adat setempat.

Agenda kemudian dilanjutkan pembukaan bazar UMKM, pelatihan alat musik kolintang, serta festival tambahan bernama Malatua Mak Dendang.

Memasuki hari kedua, panggung akan diisi dengan kelanjutan pelatihan kolintang, bazar, serta babak penyisihan lomba karaoke dan tari tradisional.

Pada hari ketiga, atmosfer festival dipastikan semakin hangat dengan penampilan band lokal Gasstik. Penonton juga akan disuguhi pertunjukan musik instrumen sape di tepi pantai.

Melalui petikan sape ini, panitia ingin memperkenalkan kekayaan seni musik dari Suku Dayak dan Suku Banua,

melengkapi kebudayaan Suku Bajau yang sudah ditampilkan sejak hari pertama.

Pada hari keempat, fokus acara akan beralih pada kampanye promosi wisata. Sebelum naik ke atas panggung, artis ibu kota yang diundang diwajibkan terlibat langsung dalam pembuatan video promosi destinasi wisata bahari Berau.

Morten menegaskan, target utama M2F adalah mendulang insight digital bagi pariwisata daerah, di mana musik bertindak sebagai pelengkap penarik massa.

Pihaknya sengaja memilih artis yang berkomitmen dan bersedia ikut berenang serta panas-panasan demi mengekspos keindahan pulau.

Sore harinya, para pengisi acara akan diajak melakukan penanaman pohon serta pelepasan tukik yang bekerja sama dengan BKSDA.

Puncaknya pada malam hari, penyanyi Arvian Dwi dijadwalkan tampil menjadi bintang utama untuk menghibur pengunjung.

Rangkaian festival akbar ini akan resmi ditutup pada hari kelima. Sembari bazar UMKM tetap bertransaksi di area lapangan,



YUDHA BUDISANTOSA
Kepala Disbudpar Berau

“Acara seni budaya itu kan kita juga ingin melestarikan, termasuk memberi panggung kepada mereka yang ada di sana untuk menampilkan kemampuannya”

panggung hiburan M2F 2026 akan ditutup lewat kolaborasi band lokal bersama penampilan spesial Stevan Pasaribu.

Melalui perpaduan apik tersebut, panitia berharap persona Pulau Maratua semakin meluas ke kancah internasional dengan mengandalkan identitas serta kebanggaan lokal. **(ADRIKNI SHOLIKHATI)**